



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate No.2: Telepon (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website: bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : Kep.1157/PW.03/Sekre/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 140 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



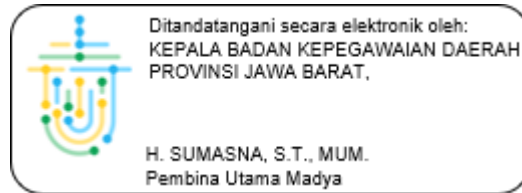
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2110);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 9 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 140 Tahun 2022 tentang Peraturan Tugas Pokok, Fungsi ,Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.**
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pedoman kegiatan yang ada dalam keputusan ini, yang kemudian disebut sebagai SOP BKD Provinsi Jawa Barat, Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8E34229CB9>

8E34229CB9

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kep.1157/PW.03/Sekre/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT

DAFTAR SOP

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	1977/OT.03/001/BKD	SOP Pengumpulan Data Perencanaan
2	1977/OT.03/002/BKD	SOP Pengumpulan Data RB Tematik
3	1977/OT.03/003/BKD	SOP Pengumpulan Data IID
4	1977/OT.03/004/BKD	SOP Pengumpulan Data SPBE
5	1977/OT.03/005/BKD	SOP Pengumpulan Data Metadata
6	1977/OT.03/006/BKD	SOP Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Kinerja
7	1977/OT.03/007/BKD	SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Resiko Unit Kerja
8	1977/OT.03/008/BKD	SOP Transaksi Belanja Gaji Pegawai
9	1977/OT.03/009/BKD	SOP Transaksi Belanja Dengan Mekanisme Uang Persediaan Tunai
10	1977/OT.03/010/BKD	SOP Transaksi Belanja Dengan Mekanisme Tambah Uang Persediaan Tunai
11	1977/OT.03/011/BKD	SOP Transaksi Belanja Dengan Mekanisme Langsung
12	1977/OT.03/012/BKD	SOP Transaksi Belanja Dengan Mekanisme Kartu Kredit Pemerintah Daerah
13	1977/OT.03/013/BKD	SOP Penyelesaian TLHP BPK RI
14	1977/OT.03/014/BKD	SOP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15	1977/OT.03/015/BKD	SOP Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16	1977/OT.03/016/BKD	SOP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17	1977/OT.03/017/BKD	SOP Penyediaan Bahan Cetak
18	1977/OT.03/018/BKD	SOP Pengelolaan Naskah Dinas Masuk
19	1977/OT.03/019/BKD	SOP Pengelolaan Naskah Dinas Luar
20	1977/OT.03/020/BKD	SOP Penerimaan Kunjungan Kerja
21	1977/OT.03/021/BKD	SOP Pendistribusian BMD
22	1977/OT.03/022/BKD	SOP Peminjaman Kendaraan
23	1977/OT.03/023/BKD	SOP Pemeliharaan Peralatan Kantor
24	1977/OT.03/024/BKD	SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas
25	1977/OT.03/025/BKD	SOP Pemeliharaan Gedung
26	1977/OT.03/026/BKD	SOP Usulan Uji Kompetensi Jafung
27	1977/OT.03/027/BKD	SOP Usulan Pengangkatan Jafung
28	1977/OT.03/028/BKD	SOP Usulan e-Sekre
29	1977/OT.03/029/BKD	SOP Pengajuan Cuti
30	1977/OT.03/030/BKD	SOP Usulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
31	1977/OT.03/031/BKD	SOP Usulan Perubahan Kelas Jabatan Pelaksana melalui Fit and Proper Test
32	1977/OT.03/032/BKD	SOP Usulan Pensiun
33	1977/OT.03/033/BKD	SOP Usulan Penghargaan
34	1977/OT.03/034/BKD	SOP Usulan Pengembangan Kompetensi Pegawai BKD Jabar
	1977/OT.03/035/BKD	SOP Usulan Kebutuhan Pegawai melalui Akuisisi Talenta



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (ESKES) dan terdapat pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8E34229CB9>

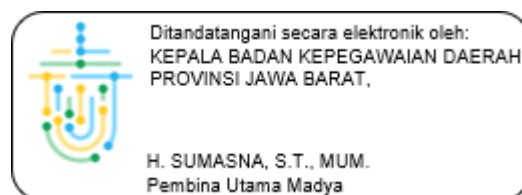
NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
37	1977/OT.03/037/BKD	SOP Kenaikan Gaji Berkala
38	1977/OT.03/038/BKD	SOP Publikasi Media Sosial dan Website
39	1977/OT.03/039/BKD	SOP PPID
40	1977/OT.03/040/BKD	SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
41	1977/OT.03/041/BKD	SOP Fasilitasi Streaming
42	1977/OT.03/042/BKD	SOP Fasilitasi Publikasi melalui AJIB Podcast
43	1977/OT.03/043/BKD	SOP Kenaikan Pangkat
44	1977/OT.03/044/BKD	SOP Kenaikan Pangkat Luar Biasa
45	1977/OT.03/045/BKD	SOP Kenaikan Pangkat Kabupaten Kota
46	1977/OT.03/046/BKD	SOP Ujian Dinas dan UPKP
47	1977/OT.03/047/BKD	SOP Kenaikan Gaji Berkala Eselon II
48	1977/OT.03/048/BKD	SOP PMK
49	1977/OT.03/049/BKD	SOP Pengajuan Rekomendasi Camat
50	1977/OT.03/050/BKD	SOP Pengajuan Rekomendasi Izin Pelantikan
51	1977/OT.03/051/BKD	SOP Pengajuan Rekomendasi Pejabat Catatan Sipil
52	1977/OT.03/052/BKD	SOP Pengajuan Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka
53	1977/OT.03/053/BKD	SOP Pengajuan Rekomendasi Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah
54	1977/OT.03/054/BKD	SOP Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
55	1977/OT.03/055/BKD	SOP Assessment Kompetensi dan Pengisian JPT Melalui Kelompok Rencana Suksesi
56	1977/OT.03/056A/BKD	SOP Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana
57	1977/OT.03/056B/BKD	SOP Mutasi Antar Perangkat Daerah
58	1977/OT.03/057/BKD	SOP Penataan dan Redistribusi
59	1977/OT.03/058/BKD	SOP Penetapan Keputusan Gubernur Pengaktifan PNS Jabatan Pelaksana
60	1977/OT.03/059/BKD	SOP Penetapan Keputusan Gubernur Rotasi Internal Jabatan Pelaksana
61	1977/OT.03/060/BKD	SOP Seleksi Mutasi Masuk Jabar
62	1977/OT.03/061/BKD	SOP Penetapan Keputusan Gubernur Mutasi PNS antar Kabupaten Kota
63	1977/OT.03/062/BKD	SOP Center of Assessment
64	1977/OT.03/063/BKD	SOP Evaluasi Jabatan Fungsional
65	1977/OT.03/064/BKD	SOP Fasilitasi Pembiayaan Pelatihan Jabatan Fungsional
66	1977/OT.03/065/BKD	SOP Fasilitasi Pembiayaan Sertifikasi Fungsional
67	1977/OT.03/066/BKD	SOP Fasilitasi Pembiayaan Sertifikasi Jabatan
68	1977/OT.03/067/BKD	SOP Fasilitasi Rekomendasi Pelatihan
69	1977/OT.03/068/BKD	SOP Monitoring, Evaluasi, dan Pemanfaatan Hasil Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
70	1977/OT.03/069/BKD	SOP Pembentukan Agen Perubahan
71	1977/OT.03/070/BKD	SOP Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
72	1977/OT.03/071/BKD	SOP Pemutihan Penyesuaian SK Jabatan Fungsional Guru
73	1977/OT.03/072/BKD	SOP Pendidikan Lanjutan
74	1977/OT.03/073/BKD	SOP Penetapan Konversi Angka Kredit
75	1977/OT.03/074/BKD	SOP Pengangkatan PNS ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Kembali
76	1977/OT.03/075/BKD	SOP Pengusulan Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama dari Kabupaten/Kota
77	1977/OT.03/076/BKD	SOP Pengusulan Uji Kompetensi dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian, Perpindahan Jabatan, Promosi
78	1977/OT.03/077/BKD	SOP Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional
79	1977/OT.03/078/BKD	SOP Perpindahan Mutasi Pejabat Fungsional antar Perangkat Daerah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8E34229CB9>

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
80	1977/OT.03/079/BKD	SOP Surat Rekomendasi Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Promosi, Mutasi JF yang Terjadi Kekosongan PPK
81	1977/OT.03/080/BKD	SOP Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
82	1977/OT.03/081/BKD	SOP Pelaksanaan Pemilihan EOTM
83	1977/OT.03/082/BKD	SOP Penanganan Disiplin
84	1977/OT.03/083/BKD	SOP Izin Cuti ASN
85	1977/OT.03/084/BKD	SOP Pelayanan Izin Cerai ASN
86	1977/OT.03/085/BKD	SOP Pelayanan Penghargaan Daerah Lainnya
87	1977/OT.03/086/BKD	SOP Pelayanan Penghargaan Ucapan Terima Kasih Bagi PNS Purabakti
88	1977/OT.03/087/BKD	SOP Pemberian Penghargaan Loyalitas
89	1977/OT.03/088/BKD	SOP Pemberian Penghargaan SLKS
90	1977/OT.03/089/BKD	SOP Penetapan Pengusulan KPLB
91	1977/OT.03/090/BKD	SOP Seleksi Penghargaan PNS Berprestasi
92	1977/OT.03/091/BKD	SOP Penerimaan CASN
93	1977/OT.03/092/BKD	SOP Penyusunan Formasi
94	1977/OT.03/093/BKD	SOP Pengajuan Pensiun
95	1977/OT.03/094/BKD	SOP Pembekalan Kewirausahaan
96	1977/OT.03/095/BKD	SOP Pembinaan Anggota KORPRI
97	1977/OT.03/096/BKD	SOP Fasilitasi TAPERA
98	1977/OT.03/097/BKD	SOP Fasilitasi Kesejahteraan
99	1977/OT.03/098/BKD	SOP Bantuan Hukum Pegawai
100	1977/OT.03/099/BKD	SOP Fasilitasi Penerbitan Karis/Karsu
101	1977/OT.03/100/BKD	SOP Layanan Status dan Kedudukan Kepegawaian (Perbaikan Nama dan Elemen NIP)
102	1977/OT.03/101/BKD	SOP Pengembangan Sistem Layanan Kepegawaian yang Berbasis Online dan Terintegrasi
103	1977/OT.03/102/BKD	SOP Permintaan Data Kepegawaian (Eksternal)
104	1977/OT.03/103/BKD	SOP Permintaan Data Kepegawaian (Internal)
105	1977/OT.03/104/BKD	SOP Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang Berbasis Online dan Terintegrasi

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8E34229CB9>

8E34229CB9